

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR : 66 TAHUN 2022
 TENTANG : PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1		FUNGSI KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEJABAT					
1		Kebijakan Bidang Kepegawaian	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit Pengolah Terkait
2		Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara					
		1. Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		a. Bahan penyusunan rencana kebutuhan b. Analisis Kebutuhan c. Pengolahan Data Kebutuhan					
		2. Perencanaan Pertimbangan Formasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		a. Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN b. Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
3		3. Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		4. Standarisasi Jabatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		a. Informasi Jabatan b. Kompetensi Jabatan c. Klasifikasi Jabatan Formasi dan Pengadaan Pegawai					
		1. Formasi ASN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit Pengolah Terkait
		a. Usulan dari Unit Kerja SKPD, disertai: 1) analisa jabatan 2) beban kerja b. Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN c. Persetujuan Menpan dan RB d. Penetapan Formasi ASN e. Penetapan Formasi Khusus					
		2. Proses Rekrutmen ASN	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3. Penetapan Pengumuman Kelulusan	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
4.		4. Berkas Lamaran yang tidak diterima	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		5. Pengangkatan ASN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		6. <i>Open Biding</i> (Seleksi Terbuka Jabatan)	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		7. Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		1) Standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai 2) Kisi-kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian 3) Evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit Pengolah Terkait
		8. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN 1) Pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi 2) Penyelenggaraan dan pengolahan seleksi 3) Sertifikasi dan pelaporan					
		Mutasi Pegawai					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Alih Tugas	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		2. Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		3. Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		4. Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
5		5. Peninjauan Masa Kerja	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		6. BAPERJAKAT	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		Pengembangan Karir					
		1 Diklat/Kursus/Magang/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Ijin Belajar Pegawai:	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan 2) Pelaksanaan 3) Pelaporan 4) Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat					
		2 Penyesuaian Ijazah	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3 Penyusunan Sistem Karier	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
6		4 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		5. Angka Kredit	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		a. Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Kredit b. Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		Kinerja 1. Penilaian Kinerja dan Standar Kerja					
		a. Sistem penilaian kerja ASN b. Standar kinerja jabatan pegawai ASN c. Penilaian kinerja pegawai ASN 2. Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja a. Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN b. Analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN c. Teknis penilaian kinerja ASN	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
7		3. Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiunan ASN					
		1. Kode Etik Pegawai	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		2. Disiplin	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		a. Penegakan Disiplin b. Peningkatan Disiplin					
		3. Pemberhentian Dengan Hormat	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
8		4. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		5. Pemberhentian Sementara	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		6. Pensiun ASN	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		a. Administrasi Pensiun ASN 1) Administrasi Pensiun ASN 2) Perekaman dan Pemeliharaan data pensiun b. Penetapan Pensiun ASN c. Penetapan Pertimbangan teknis pensiun ASN d. Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya					
		Bantuan Hukum					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
9		1. Pemberian Bantuan Hukum	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		2. Bantuan Hukum Pegawai	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		Status dan Kedudukan Pegawai 1. Status Kepegawaian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		a. Analisis status kepegawaian b. Penyusunan pertimbangan status kepegawaian 2. Kedudukan Kepegawaian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		a. Analisis kedudukan kepegawaian b. Penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
10		3. Keberatan Pegawai	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		4. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		Sistem Informasi Kepegawaian					
		1. Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		a. Pengolahan Data					
		1) Pengelolaan database kepegawaian ASN					
		2) Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN					
		b. Informasi Kepegawaian					
		1) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN					
		2) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian Non ASN					
		3) Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik					
		2. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
11		3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		1) Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian 2) Perekaman dan arsip kepegawaian 3) Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		4. Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik					
		Pengawasan dan Pengendalian 1. Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat a. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
12.		2. Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		a. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 3. Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		a. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 4. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiunan ASN a. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 5. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian 6. Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		Administrasi Pegawai					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Surat Perintah Dinas/ Surat Tugas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		2. Cuti Sakit	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		3. Cuti Bersalin	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		4. Cuti Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		5. Cuti Alasan Penting	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Cuti Besar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		7. Cuti Diluar Tanggungan Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		8. Karpeg/KPE/Karis/Karsu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		9. Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		10. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
13.		11. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		12. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		13. Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/Tunjangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		Kesejahteraan Pegawai 1. Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Asuransi Pegawai BPJS	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		3. Tabungan Perumahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		4. Bantuan Sosial	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		5. Pakaian Dinas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		6. Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
14.		7. Pemberian Tali Kasih	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		8. Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		9. Olahraga dan Rekreasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		10. Rekam Medis	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		Adminsistrasi Perseorangan					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Pegawai negeri Sipil (PNS)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		3. Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang disetarakan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		a. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Bupati dan Wakil Bupati c. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan Undang-Undang					
		4. Sekretaris Daerah	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
15.		5. ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		Penilaian Kompetensi 1. Penilaian Kompetensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		2. Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
II		FUNGSI KEUANGAN A RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) 1. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) a. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Musrenbang - Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah c. KUA beserta Nota Kesepakatannya d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) e. Nota Kesepakatan PPA f. Prioritas Plafon Anggaran 2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah b. Dokumen RKA-SKPD 3. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD: - Nota Keuangan Pemerintah - Materi RAPBD b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah c. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		e. Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD beserta penjabarannya	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		g. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta penjabarannya	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit Pengolah Unit Pengolah Terkait
		h. Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit Pengolah Terkait
		4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)					
		a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan					
		1) Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas Perubahan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					
		- Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)					
		2) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3) KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		4) Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		5) Nota Kesepakatan PPA Perubahan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		6) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan					
		1) Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) Dokumen RKA-SKPD Perubahan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)					
		1 Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan:					
		- Nota Keuangan Pemerintah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		- Materi RAPBD	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2 Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3 Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD Perubahan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		5) Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		6) Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		7) Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta penjabarannya	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		8) Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Perubahan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		5 Draf Rencana Kerja Pemerinta Kabupaten Klaten (Renja) dan daraf Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta RKA murni dan perubahan sebelum disahkan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		6 <i>Exercise/</i> perhitungan dan Rancangan APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit Pengolah Terkait
		8 Rancangan KUA	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit Pengolah Terkait
		9 Rancangan PPAS	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		10 Rancangan PPAS Perubahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit Pengolah Terkait
		11 Rancangan KUPA	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		12 DPA-SKPD Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit Pengolah Terkait
		13 DPPA-SKPD Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit Pengolah Terkait
		14 Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah dan besaran uang yang dihibahkan atas beban APBD	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		15 DPA PPKD	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		B PENYUSUNAN ANGGARAN					
		1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		C PELAKSANAAN ANGGARAN					
		1. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM, dan Sp2D) : UP, GU, TU, LS	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2 Pendapatan					
		a. Pendapatan Asli Daerah					
		1 Surat Ketetapan Pajak Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2 Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain :					
		- -Pajak Hotel	Rahasia	Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		- -Pajak Restoran	Rahasia	Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		- -Pajak Hiburan	Rahasia	Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		- -Pajak Reklame	Rahasia	Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		- -Pajak Penerangan Jalan	Rahasia	Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		- -Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan	Rahasia	Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		- -Pajak Parkir	Rahasia	Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		- -Pajak Air Tanah	Rahasia	Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		- -Pajak Sarang Burung Walet	Rahasia	Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		- -PBB Sektor Perdesaan dan perkotaan	Rahasia	Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>- -Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)</p> <p>3 Surat Ketetapan Retribusi Daerah</p> <p>4 Bukti Penarikan Retribusi, antara lain :</p> <p>a) a) Retribusi Jasa Umum</p> <p>-Retribusi Pelayanan Kesehatan -Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil -Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat -Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -Retribusi Pelayanan Pasar -Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor -Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran -Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta -Retribusi Pengujian Kapal Perikanan</p> <p>b) b) Retribusi Jasa Usaha</p>	<p>Rahasia</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Rahasia</p> <p>Rahasia</p>	<p>Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum</p> <p>Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Tertutup</p> <p>Tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> -Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan -Retribusi Tempat Pelelangan -Retribusi Terminal -Retribusi Tempat Khusus Parkir -Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa -Retribusi Penyedotan Kakus -Retribusi Rumah Potong Hewan -Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga -Retribusi Penyebrangan di atas Air -Retribusi Pengolahan Limbah Cair -Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah <p>c) c) Retribusi Perizinan Tertentu</p>	Rahasia	Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> -Retribusi Izin Mendirikan Bangunan -Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol -Retribusi Izin Gangguan -Retribusi Izin Trayek <p>d) d) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas</p>	Rahasia	Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		e) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjaan Tenaga	Rahasia	Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		5 Bukti Penerimaan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		6 Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		7 Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		8 Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		9 Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		b. Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan					
		1 Dana Bagi Hasil Yang Bersumber Dari Pajak dan Bukan Pajak	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2 Dana Bagi Hasil Untuk Kabupaten	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3 Dana Alokasi Umum (DAU)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		4 Dana Perimbangan unuk Daerah Yang Tidak Menerima DAU	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		5 Dana Alokasi Khusus (DAK)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah :					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1 Alokasi Dana Penyesuaian	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2 Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3 Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Provinsi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		4 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		5 Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		e. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		f. Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		g. Dokumen Piutang Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		h. Dokumen Pengelolaan Investasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3 Belanja					Unit Pengolah Terkait
		a. Dokumen Belanja Langsung	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		- Belanja Pegawai					
		- Belanja Barang Jasa					
		- Belanja Modal					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Dokumen Belanja Tidak Langsung <ul style="list-style-type: none"> - Pegawai - Hibah - Belanja Bagi Hasil - Subsidi - Bunga - Bantuan Sosial - Bantuan Keuangan - Belanja Tidak Terduga 	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		4 Pembiayaan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti Penerimaan Biaya <ul style="list-style-type: none"> - SILPA - Dana Cadangan - Dana Bergulir - Pinjaman Daerah - Pengalihan PBBP2 menjadi PAD b. Bukti Pengeluaran Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> - Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir - Penyertaan Modal pada BUMD - Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD - Pengeluaran dari Dana Cadangan - Pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) - Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah 	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		5 Dokumen Penatausahaan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> - Surat Penyediaan Dana (SPD) - Surat Permohonan Pembayaran (SPP) - Surat Perintah Membayar (SPM) - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana <ul style="list-style-type: none"> - Buku Kas Umum (BKU) 	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - Buku Kas Pembantu (BKP) - Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek - Rekening Koran Bank - Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi - Bukti penyeteroran Pajak - Register Penutupan Kas - Berita Acara Pemeriksaan - Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan Termasuk Arsip Data Komputer (ADK) - Laporan Pendapatan Negara - Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Tiwulan/Semesteran - Bukti Kas Pengeluaran berikut lampirannya 					
		7 Daftar Gaji	Rahasia	Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		8 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Rahasia	Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban	Unit Pengolah Terkait
		9 Pertanggungjawaban APBD	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> - Materi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah - Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah - Pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD oleh DPRD 					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - Jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggung jawaban APBD - Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap Raperda Pertanggung jawaban APBD - Permohonan Evaluasi Bupati tentang Raperda dan Raperbup Pertanggung jawaban APBD - Evaluasi Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban dan Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD <p>10 Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) <p>D PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI</p> <p>1. Dokumen Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)</p> <p>2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green Book</i>)</p> <p>3. Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan dokumen sejenisnya</p> <p>4. Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN) seperti : <i>Draft Agreement, Legal Opinion</i>, Surat menyurat dengan <i>Lender</i></p> <p>5. Dokumen Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana</p> <p>6. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Reimbursement</i> 	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1. Dokumen Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green Book</i>)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3. Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan dokumen sejenisnya	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		4. Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN) seperti : <i>Draft Agreement, Legal Opinion</i> , Surat menyurat dengan <i>Lender</i>	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		5. Dokumen Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		6. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya : - <i>Reimbursement</i>	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Direct Payment/Transfer Procedure</i> - <i>Special Commitment/ L/ C Opening</i> - <i>Special Account/Imprest Fund</i> 					
		7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		8. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		9. <i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		10 <i>Staff Appraisal Report</i>	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		11. <i>Report</i> /Laporan yang terdiri dari:	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Progress Report</i> - <i>Monthly Report</i> - <i>Quarterly Report</i> 					
		12. Laporan Hutang Daerah :	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pembayaran Hutang Daerah - Laporan Posisi Hutang Daerah 					
		13. <i>Completion Report/Annual Report</i>	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		14. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		E PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) 1. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran - Pejabat Pembuat Komitmen - Kuasa Pengguna Barang/Jasa - Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah - Pejabat Penandatangan SPM - Bendahara Penerimaan/Pengeluaran - Pengelola Barang - Termasuk berita acara serah terima jabatan 	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		F SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) 1. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2. Dokumen Kebijakan Akuntansi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		4. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		G PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN 1. Surat Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara atas Pengguna Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>2. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil - Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti Pendukungnya al : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit - Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan <p>3. Buku Rekening Bank</p> <p>4. Keputusan Pembukuan Rekening</p> <p>5. Pembukuan anggaran terdiri dari :</p> <p>Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan Daftar Pembukuan Pencarian/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran</p> <p>H PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN</p>	<p>Rahasia</p> <p>Rahasia</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum</p> <p>Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Tertutup</p> <p>Tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya 2. Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan, dll I PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILU DARI APBD 1. Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan PEMILU <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu b. Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu c. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD, PPK, PPS, KPPS dan Panwasda, Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas d. Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kabupaten f. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kabupaten dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD i. Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD 	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		L. PEMERINTAHAN DESA 1. Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2. Program Kerja Pemerintah Desa: a. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa b. Rencana Kerja Perangkat Desa 3. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 4. Bukti Pungutan Desa 5. Dokumen Pembebasan Eks Tanah Kas Desa; a. Peraturan Desa tentang Pembebasan Tanah Kas Desa b. Permohonan tentang Pembebasan Tanah Kas Desa c. Hasil persetujuan/rapat d. Rekomendasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah e. Persetujuan Bupati tentang hasil musyawarah harga tanah kas desa f. Proses pelepasan hak tanah kas desa g. Pembelian tanah pengganti h. Musyawarah tanah hak milik untuk dibeli menjadi pengganti i. Rekomendasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah j. Pelepasan tanah hak milik menjadi Kas Desa 6. Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa a. Sewa Tanah Kas Desa tidak berubah fungsi b. Sewa Tanah Kas Desa berubah fungsi 1) Peraturan Desa tentang sewa tanah kas Desa 2) Penawaran dan Penyewa 3) Rekomendasi Bupati tentang izin penyewaan tanah kas Desa 4) Permohonan izin Gubernur 5) Izin Gubernur 7. Dokumen Perubahan Peruntukkan Tanah Kas Desa	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut</p> <p>b Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		<p>Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut</p> <p>c Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		d Laporan Perkembangan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		e Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Pemerintah Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		f Good Corporate Governance (GCG)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah:	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		a Tuntutan Perbendaharaan b. Tuntutan Ganti rugi					
		PERIMBANGAN KEUANGAN PERIMBANGAN KEUANGAN 1. KEBIJAKAN	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		Rumusan kebijakan dibidang dana perimbangan, non dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah, dan pembiayaan a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Bahan c. Perumusan Kebijakan d. Penetapan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)					
		2. DANA PERIMBANGAN :Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) a. Pendataan Informasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Perencanaan Alokasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Rincian Rencana Lokasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3. NON DANA PERIMBANGAN:Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, Dana Darurat					
		a. Pendataan Informasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		b. Perencanaan Alokasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Rincian Rencana Lokasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		4. HIBAH DAERAH					
		a. Pendataan Informasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		b. Perencanaan Alokasi Hibah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Alokasi Hibah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		d. Perumusan Perjanjian Hibah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		5. PEMBIAYAAN DAERAH					
		a. Persetujuan/Penolakan atas usulan Penerbitan Obligasi Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		b. Persetujuan/Penolakan atas usulan Pinjaman Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Persetujuan/Penolakan atas pelampauan defisit APBD	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		6. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Pendataan Informasi terkait pengembangan potensi daerah PAD	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		b. Sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang PDRB	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Rekomendasi Hasil Sinkronisasi Raperda PDRD	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		d. Penghitungan Potensi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		7. PELAKSANAAN TRANSFER					
		a. Transfer Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		b. Transfer Non Dana Perimbangan (Dana Otsus, DID, Dana Desa)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Transfer Hibah Daerah, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		d. Rekonsiliasi Transfer	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		8. LAPORAN KEUANGAN					
		a. Laporan keuangan transfer ke Daerah dan Dana Desa	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		b. Laporan keuangan pembiayaan, hibah, dan dana darurat	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		9. EVALUASI KEUANGAN DAERAH					
		a. Evaluasi Dana Desentralisasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		b. Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		c. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		10. PENGEMBANGAN PENDANAAN DAERAH	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a. Pengembangan Pendanaan Perkotaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		b. Pengembangan Pendanaan Pedesaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Pengembangan Pendanaan Daerah Otonom Baru (DOB)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		d. Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Kawasan Ekonomi Khusus dan Perbatasan, Kawasan Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		11. DATA KEUANGAN DAERAH DAN DATA NON KEUANGAN DAERAH					
		a. Pengumpulan Data	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		b. Verifikasi dan Pengolahan Data	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Informasi Keuangan Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		12. PEMANTAUAN, SUPERVISI DAN EVALUASI					
		Pemantauan dan Evaluasi dibidang Perimbangan Keuangan meliputi:					
		a. Penyiapan Bahan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Laporan Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		13. SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS					
		Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dibidang Perimbangan Keuangan, meli					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
III		a. Penyiapan Bahan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Laporan Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		14. KAJIAN DAN DESIMINASI Kajian dan Desiminasi dibidang Perimbangan Keuangan, meliputi:					
		a. Penyiapan Bahan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Laporan Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		d. Hasil Kajian	Rahasia	Penentu Kebijakan, pengawas internal,dan eksternal, seta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
		15. BAHAN MASUKAN NOTA KEUANGAN Bahan masukan nota keuangan dibidang perimbangan keuangan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		FUNGSI NON KEUANGAN NON KEPEGAWAIAN					
III		A PERENCANAAN					
		1. Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang /Master Plan (RPJP)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		d. Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2. Rencana Kerja Tahunan					
		a. Usulan unit kerja beserta data pendukung	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		b. Rencana kerja Tahunan Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Rencana kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2 Program Kerja Tahunan					
		a. Program kerja Tahunan Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		b. Program Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3. Penetapan / Kontrak Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		7 Konsultasi Perencanaan Pembangunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		8 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		9 Aksi Strategis Daerah					
		a. Rancangan Awal Perencanaan Aksi Strategis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		b. Rapat pembahasan rancangan awal dengan SKPD	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		c. Sosialisasi SKPD	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Rencana Akhir Perencanaan Aksi Strategis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		e. Penetapan Perencanaan Aksi Strategis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		10 Perencanaan Pendanaan Pembangunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		a. Pendanaan APBN b. Pendanaan APBD					
		B HUKUM					
		1 Program Legislasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		a. Program Legislasi b. Bahan / Materi Program Legislasi Pemerintah Kabupaten					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		2 Peraturan Daerah termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal, Rancangan Akhir sampai dengan ditetapkan beserta Telaah Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		3 Peraturan Bupati termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal, Rancangan Akhir sampai dengan ditetapkan beserta Telaah Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		4 Keputusan/Ketetapan Bupati termasuk Rancangan Awal, Rancangan Akhir sampai dengan ditetapkan beserta telaah hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		5 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten termasuk Rancangan Awal, Rancangan Akhir sampai dengan ditetapkan beserta Telaah Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		6 Instruksi/ Surat Edaran Bupati	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		7 Instruksi/ Surat Edaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		8 Surat Perintah Bupati	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		9 Surat Perintah Pejabat Setingkat Eselon II dan II Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		10 Peraturan Pimpinan Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi a. Peraturan Ketua Lembaga Tinggi Negara b. Peraturan Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri c. Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian d. Peraturan Ketua Komisi/Tim/Dewan Nasional e. Peraturan/Ketetapan Gubernur Mulai dari Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukumnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 Standar / Pedoman / Prosedur Kerja / Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis yang bersifat nasional / regional / internasional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		12. Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding(MoU)/Kontrak /Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		a. Dalam Negeri b. Luar Negeri 13. Dokumentasi Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Surat Edaran Bupati 14. Sosialisasi / Penyuluhan / Pembinaan Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi/penyuluhan/Pembinaan Hukum b. aporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>15. Kasus / Sengketa Hukum</p> <p>a. Pidana Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum <p>b. Perdata Berkas tentang kasus/sengketa perdata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum <p>c. Tata Usaha Negara - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum - Berkas perkara PTUN sebelum disampaikan ke persidangan <p>d. Perburuhan Berkas tentang kasus/sengketa Perburuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum <p>e. Arbitrase Berkas tentang kasus/sengketa Usaha Negara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a. Pembentukan b. Perubahan c. Pembubaran					
		2. Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3. Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		4. Tata Laksana	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a. Prosedur tetap atau SOP b. Mekanisme Kerja					
		4. Evaluasi Organisasi dan Tata laksana	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a. Evaluasi Struktur Organisasi b. Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi c. Evaluasi Uraian Jabatan d. Uraian Tata Laksana					
		D PERLENGKAPAN/PERALATAN/KEKAYAAN DAERAH					
		1 Ketentuan-ketentuan tentang Pengelolaan Barang Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2 Rencana Kebutuhan Barang	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a. Usulan SKPD/OPD					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - BA - Laporan Pengadaan Jasa 					
		5 Peminjaman Barang Bergerak, meliputi: Alat Perlengkapan kantor, Kendaraan Dinas, Barang Inventaris dan Barang Bergerak lainnya	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		6 a. Bukti-bukti Kepemilikan Gedung/Bangunan meliputi : Sertifikat Tanah, Ijin Bangunan, Gambar berikut Bestek (Rancang Bangun Gedung), Silsilah Riwayat Bangunan, Cara Perolehan dan Pengalihan Kepemilikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		b. Bukti-bukti Kepemilikan Barang Bergerak, meliputi : Kendaraan Dinas, Barang Inventaris dan Barang Bergerak Lainnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		7 Administrasi Pergudangan meliputi : Buku Gudang, Buku Pengadaan, Buku Penerimaan Barang, Buku Pengeluaran Barang, Kartu Barang, Kartu Persediaan Barang dan Laporan Mutasi Barang	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		8 Pemeliharaan Barang meliputi : Pemeliharaan dan Perbaikan Perabot Kantor, Kendaraan Dinas dan Barang Inventaris Lainnya serta Balik Nama Barang	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		9 Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		10 Inventaris Barang	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a. Barang Bergerak					
		b. Barang Tidak Bergerak					
		11 Distribusi Meliputi :	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a. Barang Habis Pakai					
		b. Barang Bergerak					
		c. Barang Tidak Bergerak					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>12. Penghapusan (Penjualan, Pemindahtanganan, Tukar Guling, Hibah) Gedung Bangunan dan Kelengkan Persyaratan</p> <p>13. Kasus Penolakan Pembelian Rumah Dinas oleh Penghuni/ Bukan Penghuni, meliputi : Permohonan dan Hasil Pembahasan Persyaratannya</p> <p>E. KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN</p> <p>1. Telekomunikasi</p> <p>Administrasi Penggunaan/Langgan Peralatan Telekomunikasi meliputi: Telepon, Radio, Teleks, TV Kabel dan Internet</p> <p>2. Perjalanan Dinas:</p> <p>a. Dalam Negeri</p> <p>b. Luar Negeri</p> <p>3. Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya</p> <p>4. Risalah/ Notulen Rapat</p> <p>a. Rapat Pimpinan Daerah/ Setingkat Eselon I</p> <p>b. Rapat Pimpinan Eselon II dan III</p> <p>c. Rapat Staf</p> <p>5. Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi</p> <p>6. Pengurusan kendaraan dinas :</p> <p>a. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas</p> <p>b. Pemeliharaan dan perbaikan</p> <p>c. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p> <p>Tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Buku Tamu	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		c. Agenda Kegiatan Pimpinan Lembaga/Instansi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Kunjungan Dinas Pimpinan Lembaga/Instansi 2) Kunjungan Dinas Pejabat lain/Pegawai					
		e. Daftar nama/ alamat kantor/pejabat	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2. Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing dalam berbagai media : Kertas/ Foto/Video/Rekaman Suara/Multimedia	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan :	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a. Kliping Koran b. Brosur/leaflet/poster/plakat c. Pengumuman/pemberitaan					
		4. Hubungan antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		a. Hubungan antar lembaga pemerintah					
		b. Hubungan dengan organisasi sosial/LSM					

NO	KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		10. Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan Administrasi pemberian penghargaan/ tanda kenag-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar 11. Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf G. PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN 1. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, mulai dari rancangan awal sampai dengan akhir termasuk catatan-catatan perkembangan dan log book a. Administrasi penelitian, pengkajian dan pengembangan meliputi : rencana kerja, TOR proposal, pembentukan tim kerja dan surat menyurat b. Hasil Penelitian dan Pengembangan c. Hasil Pengkajian Kebijakan Strategi 2. Sosialisasi dan Deseminasi Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan 3. Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan 4. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan 5. Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan a. Data b. Statistik c. Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian 6. Evaluasi Pelaksanaan kebijakan 7. Seminar, Lokakarya, Temukarya, <i>Workshop</i> H. PENGAWASAN	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait

